

Membangun dan Mengembangkan Hubungan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan Islam

H. Sagaf S. Pettalongi

Dosen STAIN Datokarama dan Unisa Palu

Abstract

Public relations and educational institution are two significant components, which should be intensively strengthened and improved. In addition to being as a part of management in educational institution, public relation serves as a source of information for school and community, even for all the stakeholders, to inform the development and efforts which have been made and will be made in the future as well. Educational institutions, which can improve a good link and intensive communication with society, will give positive impacts to the programs set by schools, and also improve quality of school. Because of this, the school has a good reputation in the eyes of the educational stakeholders since they can find out what has been done so far and what become school needs as well.

Kata kunci : humas, pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah.

PENDAHULUAN

Hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat dapat diartikan sebagai proses komunikasi antara lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat untuk membentuk pengertian dan kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan sehingga keduanya terdorong untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memajukan lembaga

pendidikan Islam (Bafadal, 2003). Pengertian yang memiliki kesamaan juga dikemukakan oleh Leslie bahwa :

School public relations is a process of communication between the school and community for purpose of increasing citizen understanding of educational needs and practices encouraging intelligent citizen interest and cooperation in the work of improving the school (Leslie Hymes, 1989).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat dapat berupa komunikasi dari lembaga pendidikan Islam kepada masyarakat, atau sebaliknya dari masyarakat kepada lembaga pendidikan Islam. Hubungan masyarakat adalah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, *goodwill*, kepercayaan, penghargaan dari publik sesuatu badan khususnya dan masyarakat umumnya (Abdurrahman, 2003). Menurut Suryosubroto yang menyadur pendapat Hooftman bahwa hubungan masyarakat (humas) adalah untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap sesuatu badan, publik harus diberi penerangan-penerangan yang lengkap dan obyektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya. Selain itu pendapat-pendapat dan saran-saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai (Suryosubroto, 2004).

Dilihat dari fungsinya, humas merupakan bagian dari manajemen seperti dikemukakan oleh Glenn and Denny Griswold bahwa :

Public relations is the management function which evaluates public attitudes, identifies the policies and procedures of an individual or organization with the public interest, and executes a program of action to earn public understanding and acceptance (Glenn dan Denny, 1978).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa humas merupakan salah satu fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan

sikap-sikap publik, menyesuaikan polise dan prosedur instansi atau organisasi dengan kepentingan umum, menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat.

Tujuan Humas

Jika dilihat dari beban tugasnya humas merupakan kegiatan melakukan publisitas tentang kegiatan organisasi kerja yang patut diketahui oleh pihak luar secara luas. Kegiatannya dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi dan memberikan penerangan-penerangan untuk menciptakan pemahaman yang sebaik-baiknya di kalangan masyarakat luas mengenai tugas dan fungsi yang diemban organisasi kerja tersebut, termasuk juga mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah ada, sedang, dan akan dikerjakan berdasarkan volume dan beban kerjanya (Nawawi, 1991). Hubungan dengan masyarakat dapat dimulai dengan membuat program sekolah menjadi semakin baik, jika telah ada peningkatan yang maksimum di sekolah, maka masyarakat akan mau memperhatikan (Unruh dan Willer, 1990). Komunikasi itu sendiri pada hakekatnya merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau kelompok (Bafadal, 2003).

Pengembangan humas dalam lembaga pendidikan adalah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat yang perlu diupayakan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam tidak hanya dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan Islam oleh yayasan atau badan sosial, tetapi peran serta masyarakat pada umumnya dan orang tua murid pada khususnya yang juga perlu digalakan, sehingga penyelenggaraan lembaga pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk orang tua dan masyarakat.

URGENSI HUBUNGAN MASYARAKAT DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Hubungan sekolah dengan masyarakat sebenarnya telah terjalin secara simultan, sebab sekolah merupakan pusat pembinaan pribadi

warga negara dan menafasi dinamika masyarakat dalam menuju suatu perubahan. Hubungan itu dapat dilihat dari dua segi, (1) sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melakukan fungsi pendidikan dan (2) sekolah sebagai produsen yang melayani pesan-pesan pendidikan dan masyarakat lingkungannya (Syafaruddin dan Nasution, 2005). Karena itu peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan perlu digalakan dalam hal (1) peran serta secara langsung, seperti mendirikan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas baik, (2) peran serta secara tidak langsung, seperti aktif dalam kepengurusan maupun keanggotaan yayasan atau Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) atau komite sekolah/madrasah atau mungkin dewan sekolah (Bafadal, 2003). Hubungan sekolah dengan masyarakat secara baik akan menentukan kelangsungan dan kemajuan suatu lembaga pendidikan. Sekolah yang mampu mengadakan hubungan dengan masyarakat akan bisa bertahan lama, bahkan bisa saja suatu lembaga pendidikan belum memiliki banyak fasilitas, dana yang terbatas dan sarana pendukung lainnya yang minim, namun pimpinan (manajer) memiliki kemampuan mendekati para dermawan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, pemerhati pendidikan (baca stakeholders) dengan alasan yang rasional, maka lembaga pendidikan itu bisa maju dan berkembang dari partisipasi semua stakeholders tersebut (Pidarta, 1988). Undang-Undang sistim pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (Depag, 2003). Aturan ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak boleh menutup diri, tetapi perlu selalu mengadakan kontak hubungan dengan dunia luar yakni orang tua, dan masyarakat pemerhati pendidikan lainnya (Pidarta, 1988).

Dengan demikian tampak jelas bahwa lembaga pendidikan tidak bisa berdiri sendiri dalam membina dan mengembangkan pendidikan, tetapi harus selalu menjalin hubungan secara terbuka dan bekerja sama dengan semua stakeholders pendidikan. Sebab esensinya masyarakat juga berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan (Depag, 2003). Bahkan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan (Depag, 2003).

Total Quality Management (TQM) sebagai model pendekatan manajemen berbasis mutu menekankan bahwa pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang terbuka, selalu berorientasi pada customer dan fokus pada pelanggan (masyarakat), dengan peningkatan kualitas dalam semua sektor, dan dilakukan oleh semua orang dalam organisasi serta dilakukan secara terus menerus dengan bersama-sama stakeholders lainnya. Walaupun penekanan dalam TQM adalah pelayanan kualitas terpadu oleh semua personil dalam organisasi dengan turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas, namun peran serta masyarakat juga dibutuhkan sebagai pelanggan dan pemakai hasil pendidikan. Karena itu pengembangan konsep TQM dalam hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan Islam, bertujuan menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu organisasi atau lembaga pendidikan terhadap segmen masyarakat yang kegiatannya langsung ataupun tidak langsung yang mempunyai dampak bagi masa depan lembaga pendidikan (Rosyada, 2004). Humas merupakan bagian terpenting dalam memajukan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam, karena merupakan metode komunikasi dalam mengefektifkan dan mengefisienkan upaya-upaya pencapaian tujuan pendidikan (Ruslan, 2001). Dengan demikian melalui kegiatan Humas, lembaga pendidikan terus melakukan perbaikan dan pengembangan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Manajemen Pengembangan hubungan masyarakat

Seperti dikemukakan oleh Glenn bahwa humas adalah bagian dari manajemen (Glenn dan Willer, 1990). Dalam manajemen pendidikan, humas merupakan salah satu substansi dari garapan manajemen pendidikan (Mulyasa, 2003). Manajemen humas adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sumber daya dalam menciptakan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah semua tenaga, dana dan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan (Bafadal, 2003). Humas adalah alat manajemen moderen, sehingga secara struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi, artinya humas bukan merupakan hal yang terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi (Ruslan, 2001), melainkan bagian dari substansi manajemen termasuk juga manajemen pendidikan.

Pengembangan manajemen humas dengan lembaga pendidikan Islam dan masyarakat mencakup pada kegiatan-kegiatan berikut ini :

Analisis kebutuhan

Pelanggan utama lembaga pendidikan adalah masyarakat (costumer). Sebagai pemakai dan penerima hasil pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan, pelanggan berhak untuk menuntut suatu standar kualitas tertentu, karena itu setiap lembaga pendidikan perlu melakukan analisis kebutuhan terhadap pelanggan (masyarakat). Hasil analisis itu akan menjadi input bagi lembaga pendidikan untuk melakukan dan melibatkan masyarakat dalam keikutsertaan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan. Karena itu dalam TQM, pelanggan dan pemasok ada di dalam dan diluar organisasi atau lembaga pendidikan, hubungan dengan pelanggan harus dijalin kerjasama secara baik agar dapat diketahui secara persis apa yang sebenarnya diinginkan pelanggan atas hasil atau luaran lembaga pendidikan (Nasution, 2005). Keberhasilan lembaga pendidikan dalam

menjalin hubungan dengan pelanggan (masyarakat) sehingga masyarakat akan mau terlibat secara aktif, dengan begitu maka program-program pengembangan kualitas dapat didukung oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan dalam menganalisis kebutuhan yakni :

- a. mengidentifikasi program-program lembaga pendidikan Islam yang perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- b. Mengidentifikasi masyarakat yang dapat dijadikan sasaran hubungan
- c. Menetapkan masyarakat yang akan dijadikan sasaran hubungan (Bafadal, 2003).

Selanjutnya masyarakat dapat diberdayakan melalui beberapa tahapan yakni *pertama*, masyarakat mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk meningkatkan kehidupannya dan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan, *kedua*, mereka akan mengalami pengurangan perasaan ketidak mampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri, *ketiga*, selanjutnya masyarakat dapat bekerja sama untuk banyak mengambil keputusan dan melibatkan diri dalam pengembangan maupun peningkatan kualitas pendidikan (Mulyasa, 2003).

2. Pengembangan Program

Pengembangan program hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan, dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan dalam mengembangkan program hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat yaitu :

- a. Merumuskan tujuan hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat.
- b. Menetapkan masyarakat yang akan dijadikan sasaran hubungan antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat.
- c. Menetapkan pendekatan yang akan digunakan.
- d. Menyusun rencana operasional, seperti sarana yang akan digunakan, waktu pelaksanaan dan penanggung jawabnya (Bafadal, 2003).

Tujuan hubungan masyarakat dalam lembaga pendidikan Islam, secara umum meliputi atas :

- a. Memberikan pengertian tentang program lembaga pendidikan Islam yang sedang dikembangkan kepada semua pihak.
- b. Menumbuhkan pengertian tentang hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam dalam merealisasikan program-programnya.
- c. Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berperan serta dalam memajukan lembaga pendidikan Islam (Syafaruddin, 2005).

Oteng Sutisna mengajukan beberapa format program pengembangan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, yaitu (1) untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran-sasaran dari sekolah, (2) untuk menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan yang terpenuhi, (3) untuk mempersatukan orang tua murid dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik, (4) untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan, (5) untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah, (6) untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pekerjaan sekolah dan (7) untuk mengerahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah (Sutisna, 1995).

Jalinan kerjasama dalam mengembangkan program hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan dapat berlangsung baik, jika pimpinan lembaga pendidikan Islam proaktif, kreatif dan inovatif dalam mengelola institusi yang menjadi tanggung jawabnya (Syafaruddin, 2005). Jika lembaga pendidikan Islam mengharapakan orang tua murid maupun masyarakat memberikan dukungan yang berarti kepada program sekolah, maka penyampaian informasi tentang sekolah (fakta, pikiran, perasaan, gagasan, kebutuhan, saran) kepada mereka adalah kewajiban penting dari setiap administrator sekolah (Sutisna, 1995). Depdiknas memberikan beberapa cara dalam mengefektifkan komunikasi lembaga

pendidikan dengan masyarakat, yaitu: (1) mengidentifikasi orang-orang kunci (orang tua asiswa yang dituakan atau *informal leaders*, pejabat, tokoh bisnis dan profesi lainnya), (2) Melibatkan orang-orang kunci tersebut dalam kegiatan sekolah, khususnya yang sesuai dengan minatnya, (3) Memilih saat yang tepat dalam melibatkan tokoh kunci bagi dukungan program sekolah (Diknas, 1999).

3. Pengaturan pelaksanaan program hubungan dengan masyarakat

Lembaga pendidikan Islam adalah sub sistem dari sistem sosial masyarakat. Oleh karenanya lembaga pendidikan Islam tidak bisa memisahkan diri atau mengasingkan diri dari masyarakat.

Pengaturan pelaksanaan hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat tidak hanya memerlukan tokoh kunci dalam mendukung program pengembangan kelembagaan tetapi perlu adanya keterlibatan secara maksimal masyarakat dalam kemajuan lembaga pendidikan Islam. Upaya-upaya yang perlu dilakukan ke arah itu adalah (1) melaksanakan program-program kemasyarakatan (kebersihan lingkungan, kelancaran lalu lintas disekitar sekolah, bantuan sosial dan kesehatan), (2) Mengadakan *open-house* untuk memberikan kesempatan luas bagi masyarakat mengetahui program sekolah, (3) Mengadakan bulletin sekolah atau majalah atau lembaran informasi secara berkala yang memuat program sekolah yang dilaksanakan, (4) Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina suatu program sekolah, (5) Membuat program kerjasama sekolah dengan masyarakat dalam hari-hari besar nasional maupun keagamaan (Syafaruddin, 2003). Secara teknis operasional pelaksanaan program hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan Islam bisa juga dilakukan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Memberi tugas pelaksanaan hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat pada personel sekolah berdasarkan rencana program yang telah dikembangkan.

- b. Mengorganisasikan semua pelaksanaan hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat.
- c. Mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan hubungan lembaga pendidikan Islam dengan masyarakat (Komaria, 2004).

Menurut Edward L. Bernay seperti dikutip oleh Ruslan bahwa humas mempunyai tiga fungsi utama yakni :

- a. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
- b. Melakukan komunikasi persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung terhadap lembaga pendidikan.
- c. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu lembaga atau organisasi sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya (Ruslan, 2005).

Dalam upaya mengefektifkan program hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan Islam, hal yang terpenting pula adalah kepemimpinan lembaga pendidikan Islam yang harus baik dan efektif. Karena hanya dengan kepemimpinan, lembaga pendidikan Islam akan mencapai sasaran manajemen yang efektif sehingga memungkinkan masyarakat puas terhadap program yang ditawarkan, para personil memiliki kepuasan kerja serta organisasi dapat berkembang dengan cepat, lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik dan memiliki kepribadian, sebagai tujuan akhir yang diharapkan setiap orang tua dan masyarakat dari luaran suatu lembaga pendidikan Islam.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat (humas) dengan lembaga pendidikan Islam adalah bagian terpenting dalam mengembangkan manajemen pendidikan pada lembaga pendidikan Islam (sekolah), sebab kehadiran lembaga pendidikan tidak akan bermakna tanpa dukungan dari masyarakat, demikian pula sebaliknya. Humas adalah aspek terpenting dalam pengembangan suatu manajemen lembaga pendidikan Islam.

Merancang program humas dalam mengelola lembaga pendidikan Islam dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu lembaga pendidikan, sebab kemajuan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dibutuhkan dukungan dari semua *stakeholders* pendidikan. Dan upaya pelibatannya secara sistematis membutuhkan perencanaan dan strategi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolp Unruh dan Robert A. Willer, 1990. *Public Relations For Schools*, New York : Prentice Hall. Inc..
- Aan Komariah dan Cipi Triatna, 2005. *Visionary Leadership; Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta : Bumi Aksara.
- B. Suryosubroto, 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen Agama, 2003. *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional*, Jakarta : Dirjen Bagais.
- Departemen Pendidikan Nasional, 1999. *Pola dan Strategi Pembinaan Pendidikan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
- Dede Rosyada, 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : PT Kencana.
- E.Mulyasa, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, strategi dan Implementasi*, Bandung : Rosdakarya.
- Glenn and Denny Griswold, 1978. *Your Public Relations*, New York : Funk & Wagnalle Company.
- Hadari Nawawi, 1991. *Administrasi Pendidikan*, Jakarta : Gunung Agung.

902H. Sagaf S. Pettalongi

Ibrahim Bafadal, 2003. *Dasar-Dasar Manajemen dan Supervisi*, Jakarta : Bumi Aksara.

Jerome S.Arcaro, 2005. *Quality in Education, An Implementation Handbook*, St. Lucie Press.

Leslie J. Hymes, 1989. *Effective Home Relations*, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, Inc..

Made Pidarta, 1988. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.

M.N. Nasution, 2005. *Manajemen Mutu Terpadu, Total Quality Management*, Bogor : PT Ghalia Indonesia.

Oemi Abdurrahman, 1981. *Dasar-Dasar Public Relationss*, Bandung : PT Alumni.

Oteng Sutisna, 1995. *Administrasi Pendidikan*, Bandung : PT Angkasa.

Rosady Ruslan, 2001. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Konsepsi dan Aplikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Syafaruddin, 2005. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta : Ciputat Press.

Syafaruddin dan Irwan Nasution, 2005. *Manajemen Pembelajaran*, Jakarta : Ciputat Press.